

## BAB IV

### ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

#### 4.1. Pemasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*expectation gap*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan daerah yang akan menjadi agenda utama untuk ditangani melalui program dan kegiatan selama lima tahun mendatang dikelompokkan berdasarkan urusan, yang akan diuraikan sebagai berikut.

##### a. Pendidikan

- 1) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya ke lembaga PAUD, dari jumlah peserta PAUD tahun 2015 sebesar 15.289 anak sementara jumlah penduduk pada usia 0-3 tahun di Kabupaten Rembang tahun 2015 sebesar 37.355 anak, artinya masih ada 22.066 orang penduduk usia 0-3 tahun yang belum terlayani. APK PAUD 3 – 6 tahun pada tahun 2015 meningkat menjadi 72,36%.
- 2) Belum tercukupinya ketersediaan lembaga PAUD. Jumlah lembaga PAUD seharusnya sebanyak 1.245 lembaga untuk melayani penduduk usia 0 – 3 tahun sebanyak 37.355 orang. Jumlah yang tersedia pada tahun 2015 sebanyak 850 unit, sehingga masih ada kekurangan sebanyak 395 unit lembaga PAUD.
- 3) Belum optimalnya angka capaian APM jenjang pendidikan dasar baik SD sederajat maupun SMP sederajat, data tahun 2015, APM SD sederajat sebesar 86,90% sedangkan APM SMP sederajat baru 76,50%. Angka tersebut masih dibawah target MDGs dan juga PUS/EFA (Pendidikan Untuk Semua/*Education for All*) sebesar 100%;
- 4) Masih adanya angka putus sekolah untuk SD dan SMP

sederajat. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD sederajat 0,01% pada tahun 2015, meskipun angka putus sekolah SD sederajat Kabupaten Rembang sudah di bawah Angka Putus Sekolah Nasional yaitu 0,15%. Sedangkan angka putus sekolah SMP sederajat tahun 2015 sebesar 0,19%, angka ini sedikit lebih baik dari target nasional sebesar 0,22% ;

- 5) Angka melanjutkan sekolah belum optimal. Angka Melanjutkan dari SMP sederajat ke SMA sederajat pada tahun 2015, sebesar 86,24%, kondisi ini dibawah target yang ditetapkan oleh Renstra Kemendikbud yaitu 90%.
- 6) Masih rendahnya kualitas pendidik pada jenjang pendidikan PAUD dan SD/MI. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya persentase pendidik dengan kualifikasi S1/D4, untuk pendidik PAUD pada tahun 2015 sebesar 1,75%, dan SD/MI sebesar 87,31%. Sementara untuk capaian SMP/MTs 92,33% dan SMA/SMK 96,17%, sudah cukup baik namun masih perlu untuk ditingkatkan. Sebagaimana Resntra Kementrian, target persentase guru dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4; untuk SD 82%, SMP 98% dan SMA 100%.
- 7) Belum adanya dukungan tenaga kependidikan (tenaga administrasi) dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (Hampir seluruh SD belum memiliki tenaga administrasi).
- 8) Belum meratanya distribusi tenaga guru (PNS) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD).

#### **b. Kesehatan**

- 1) Tingginya Angka Kematian Ibu. Kematian ibu merupakan isu nasional dan menjadi target dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kabupaten Rembang memiliki kasus kematian yang cukup tinggi tahun 2011 sampai dengan 2015, kasus kematian ibu cenderung mengalami penurunan yaitu berturut-turut 11 kasus, 13 kasus, 17 kasus, 14 kasus dan tahun terakhir 8 kasus. Jumlah kasus tersebut masih belum memenuhi target penurunan angka kematian ibu sebesar 2 kasus;
- 2) Meningkatnya penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan tingkat penularan penyakit seperti TB dan HIV AIDS. Sedangkan rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menyebabkan tingginya kasus DBD. Angka kejadian TB/100.000 penduduk sebesar 90 pada tahun 2015, meningkat dari angka kejadian 75,98 pada tahun 2011. Sedangkan angka kesakitan DBD 113,15/100.000 penduduk pada tahun 2015, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 sebesar 16,23;

- 3) Tingginya kasus kematian bayi dan balita. Tahun 2015, AKB 134 kasus (14,86/1.000 KH) dan AKABA 162 kasus (18,08/1000 KH). Kondisi ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2014, jumlah kelahiran hidup sebanyak 8.999 bayi, jumlah bayi yang meninggal sebanyak 125 bayi dengan Angka Kematian bayi (AKB) sebesar 13,89/1.000 KH;
- 4) Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan dasar karena seluruh Puskesmas pada tahun 2016 ini belum terakreditasi ;
- 5) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilihat rasio dokter per satuan penduduk 10,05 per 100.000 penduduk. Adapun target indikator Indonesia sehat, adalah 40 dokter per 100.000 penduduk.
- 6) Masih rendahnya cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pada tahun 2015 cakupan rumahtangga berperilaku hidup bersih dan sehat baru sebesar 77,1%.

### **c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- 1) Belum optimalnya sistem drainase di perkotaan karena banyak saluran drainase (36%) yang rusak / tersumbat ;
- 2) Belum semua rumah tangga terlayani air minum, total rumah tangga yang mampu mengakses air minum hanya 74,34%. Cakupan pelayanan air minum target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2019 mencapai 100%;
- 3) Belum terintegrasinya pembangunan jaringan air minum. Belum adanya fasilitasi pembangunan jaringan air berbasis embung sungai dan sumur bawah tanah yang disambungkan dengan instalasai pengolahan air minum.

- 4) Belum semua jalan kondisinya baik, persentase kondisi jalan dalam kondisi baik baru mencapai 48,98% pada tahun 2015;
- 5) Belum terpenuhinya target RTH publik, karena dari target 20% baru mampu mencapai 11,75% ;
- 6) Belum optimalnya pengendalian tata ruang. Hal ini terjadi karena perubahan pola dan struktur tata ruang pada dokumen RTRW yang tersedia.
- 7) Kurangnya ketersediaan air baku baik air irigasi maupun air industri. Tahun 2015 kapasitas maksimal ketersediaan air baku baru sebesar 8.101.319.000 m<sup>3</sup> untuk irigasi dan industri.

**d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- 1) Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertata dan tersentuh program penataan lingkungan; Terdapat 47 desa/kelurahan tersebar di 4 kecamatan di wilayah pesisir termasuk wilayah permukiman kumuh.
- 2) Belum optimalnya penyediaan rumah oleh Pemerintah Daerah, selama ini sebagian besar kebutuhan rumah dipenuhi oleh perorangan maupun swasta.
- 3) Masih adanya rumah tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2015, sebesar 59.453 unit.

**e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

- 1) Masih terjadinya kejadian kriminal di wilayah Kabupaten Rembang. Kasus kriminal Tahun 2015 sebesar 351 kasus kriminal, menurun dibandingkan dengan kejadian tahun 2014 terjadi sebanyak 354 kasus, namun penurunannya belum signifikan. Adapun angka kriminalitas tahun 2015 5,12% lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya 5,32%;
- 2) Belum optimalnya peran serta ormas atau LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat.

**f. Sosial**

- 1) Masih adanya PMKS yang belum terdata dan belum tertangani, PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 40% pada tahun 2015;
- 2) Rendahnya aksesibilitas pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial, yang tertangani baru 50% ;

- 3) Minimnya persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2015 jumlah panti sosial di Kabupaten Rembang sebanyak 9 unit dan baru mencapai 63,12% yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;

**g. Tenaga Kerja**

- 1) Masih relatif tingginya angka TPT. Capaian TPT tahun 2015 sebesar 4,51%.
- 2) Masih tingginya pencari kerja yang belum mampu ditempatkan, dimana TPAK/ persentasenya pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2015 baru mencapai 66,97%;

**h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Masih adanya ketimpangan gender dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari data 2014 Capaian IPG Kabupaten Rembang yaitu sebesar 86,04 dari kondisi ideal 100, sementara itu apabila dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah angka tersebut lebih rendah. Angka IPG provinsi sebesar 91,89 ;
- 2) Masih sedikitnya lembaga PUG yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraan gender yaitu 4 dari 62 lembaga yang ada ;
- 3) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jumlah kasus kekerasan anak dan perempuan pada tahun 2015 sebanyak 12 kasus.
- 4) Rendahnya akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan daerah, hal ini didindikasikan dengan rendahnya keterlibatan perempuan di DPRD yaitu hanya 22,22% tahun 2015 ;
- 5) Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, pada tahun 2015 hanya mencapai 3,14%, dibandingkan tahun sebelumnya kondisinya tidak ada perubahan (stagnan);
- 6) Rendahnya capaian kedudukan perempuan sebagai pemimpin di lembaga pemerintahan, hal ini bisa ditunjukkan data tahun 2015 hanya ada 1 pejabat perempuan eselon 2, 23 pejabat eselon 3, 128 pejabat eselon 4, dan 26 pejabat eselon V. Kondisi tersebut jauh dibandingkan jumlah pejabat laki-laki ;

- 7) Rendahnya perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi. Tahun 2011 persentase perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 45,14% sudah menunjukkan angka keseimbangan, namun kondisinya terus menurun hampir setiap tahun dan pada tahun 2015 mencapai angka 37,22 %, merupakan capaian yang terkecil selama lima tahun terakhir ;
- 8) Rendahnya keberdayaan perempuan ditunjukkan dengan semakin menurunnya angka IDG dari tahun 2011 sd 2014 yaitu dari 66,97 menjadi 66,43, capaian IDG tersebut jauh di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,46;
- 9) Belum tersedianya secara lengkap data terpilah gender pada seluruh PD sebagai dasar untuk perencanaan program kegiatan maupun pengambilan kebijakan.
- 10) Masih minimnya jumlah Desa Ramah Anak. Penetapan Desa Gunem sebagai desa percontohan perlindungan anak, perlu diikuti dengan desa-desa lain guna meningkatkan capaian indikator KLA.

**i. Pangan**

- 1) Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk dan belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang. Hal ini ditandai dengan dengan skor PPH pada tahun 2015 sebesar 86,8 angka ini belum ideal karena terdapat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap konsumsi beras dan terigu.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan melalui sistem CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah) dan CPM (Cadangan Pangan Masyarakat). Sampai saat ini Kabupaten Rembang belum mempunyai CPPD.
- 3) Meningkatnya ancaman penggunaan bahan kimia dan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk pangan, sehingga memerlukan pengawasan mutu dan keamanan pangan ;

**j. Pertanian**

- 1) Masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat. Bidang tanah yang bersertifikat dari tahun 2011 sd 2015 adalah 38,7% dari total 365.502 bidang tanah di Kab. Rembang.

**k. Lingkungan Hidup**

- 1) Masih rendahnya penanganan sampah, ditunjukkan dengan kondisi penanganan sampah pada tahun 2015 baru mencapai 72% artinya masih ada 28% sampah yang belum tertangani;
- 2) Masih rendahnya pengelolaan sampah pada sistem pengangkutan, ditunjukkan dengan kondisi pengangkutan sampah pada tahun 2015 baru mencapai 55% artinya 45% sampah masih belum terangkut;
- 3) Rendahnya aktivitas pemantauan terhadap status baku mutu air, dari 43 titik wajib pantau baru 3 titik yang mendapatkan pemantauan pada tahun 2015;
- 4) Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL; Hal ini ditandai dengan Masih banyaknya perusahaan yang belum menyusun dan melaksanakan RKL/RPL maupun UKL/UPL.
- 5) Masih banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
- 6) Indeks Kualitas Lingkungan hidup belum tercapai sesuai dengan standar nasional yaitu 68,5 pada tahun 2019, kondisi pada tahun 2014 baru mencapai 63,45.
- 7) Masih terbatasnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dari tahun 2011 sd 2015 jumlah TPA hanya 1 unit.
- 8) Belum optimalnya upaya rehabilitasi hutan mangrove. Hutan mangrove yang direhabilitasi baru mencapai 116 ha.
- 9) Masih adanya lahan kritis yaitu sebesar 560 ha pada tahun 2015.

**1. Kependudukan dan Catatan Sipil**

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya cakupan penduduk yang memiliki KTP sebesar 87,52%, bayi ber-akte kelahiran 96,45% dan rasio kepemilikan akta lahir sebesar 81% tahun 2015. Hal tersebut masih berada cukup jauh dibawah target yang diharapkan seperti yang termuat dalam SPM ;



- 2) Belum optimalnya informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan. Tahun 2015 hanya mampu tercapai 85,50% meskipun trennya selalu meningkat dari tahun ke tahun.

**m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat ;
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan PKK dan Posyandu. Jumlah PKK aktif 309 dan Posyandu aktif 1.225 pada tahun 2015.
- 3) Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 0,4% pada tahun 2015.
- 4) Kesiapan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penerapan undang-undang tentang desa masih belum optimal.
- 5) Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

**n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif MKJP pada tahun 2016 16 61,% dan cakupan peserta aktif pria 1,14%;
- 2) Masih tingginya angka Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*) dan Drop Out (DO), pada tahun 2015 mencapai angka sebesar 6,93%;
- 3) Tingginya cakupan PUS dengan usia di bawah 20 tahun. Hal ini ditunjukkan bahwa cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun sebesar 3,68% pada tahun 2015. Selain itu data tersebut dari tahun 2011 – 2015 cenderung meningkat.
- 4) Masih rendahnya cakupan tribina pada desa/kelurahan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Cakupan tribina pada tahun 2015 baru sebesar 83,80%.

**o. Perhubungan**

- 1) Ketersediaan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang belum memadai, baik yang melayani penumpang dalam kabupaten maupun yang menghubungkan antar kabupaten ;



- 2) Masih tingginya jumlah angka kecelakaan di Kabupaten Rembang. Pada tahun 2015 mencapai jumlah 408 angka kecelakaan.
- 3) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas jalan pada jalan kabupaten/kota. Terdapat 67% fasilitas perlengkapan jalan termasuk rambu, marka dan guardrail dan PJU di tahun 2015.
- 4) Masih rendahnya jumlah persentase kapal yang bersertifikasi. Pada tahun 2015 baru 28,78% kapal yang bersertifikasi.
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan kegiatan operasional Pelabuhan Rembang Terminal Sluke.
- 6) Lemahnya pengawasan terhadap kendaraan berat yang melintas di Kabupaten Rembang.
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan pangkalan truk,
- 8) Rendahnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan. Pada tahun 2015 ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sebesar 67%.

**p. Komunikasi dan Informatika**

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah untuk penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat luas. pada tahun 2015 perangkat daerah yang memiliki website baru sebesar 86,97%, dan informasi yang disajikan belum *up to date*.
- 2) Belum optimalnya sistem informasi terpadu yang mengarah pada *e-Government* dan penerapan *blueprint e-Government* belum optimal. Jumlah aplikasi e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota adalah 20 aplikasi pada tahun 2015.
- 3) Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi.
- 4) Belum adanya unit pengaduan *online* terpadu.
- 5) Masih terbatasnya jumlah jaringan komunikasi, baru terdapat 58 jaringan komunikasi pada tahun 2015.

**q. Koperasi dan UMKM**

- 1) Masih terdapat koperasi yang tidak aktif. Pada tahun 2015 sebesar 21,00% koperasi yang tidak aktif dari total 554 koperasi.
- 2) Masih rendahnya peluang UMKM untuk meningkatkan skala usaha melalui peningkatan asset dan omzet;

- 3) Rendahnya partisipasi UMKM mengikuti pameran promosi produk. Pada tahun 2015 hanya 6 UMKM atau 0,01% dari total 39.363 UMKM yang ada bisa mengikuti pameran promosi produk.
- 4) Belum optimalnya pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif.

**r. Penanaman Modal Daerah**

- 1) Kurangnya promosi potensi Kabupaten Rembang kepada calon investor ;
- 2) Belum optimalnya peningkatan nilai investasi. Hal ini diindikasikan oleh minimnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA, hanya sebanyak 20 investor dengan nilai investasi 3,478 T pada tahun 2015.
- 3) Masih kurangnya kegiatan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan investasi. Pada tahun 2015 hanya berjumlah 3 kegiatan fasilitasi.

**s. Kepemudaan dan Olahraga**

- 1) Belum optimalnya pembinaan atlet olahraga prestasi.
- 2) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh generasi muda. Jumlah KUPP/KWP (Kelompok Wirausaha Pemuda) hanya berjumlah 22 kelompok pada tahun 2015, belum ada perkembangan dari tahun 2011 dengan angka yang sama.
- 3) Belum optimalnya kegiatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan kegiatan kepemudaan yang ada.
- 4) Kurangnya penyelenggaraan event olahraga.
- 5) Belum tercukupinya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga.

**t. Statistik**

- 1) Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah ;
- 2) Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.
- 3) Belum tersedianya *database* yang berisi data dan informasi yang valid dan *up to date*.

**u. Persandian**

- 1) Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.

**v. Kebudayaan**

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten Rembang, karena saat ini benda cagar budaya yang dilestarikan baru 6,3% (2015), karena belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) di Kabupaten Rembang.
- 2) Masih rendahnya pembinaan kelompok kesenian dimana dari jumlah kelompok kesenian yang ada 311 kelompok, yang terbina baru 65 %;
- 3) Belum tersedianya Gedung Kesenian/ sarana dan prasarana yang representatif untuk menampung aktivitas seni.
- 4) Masih sedikitnya jumlah dan kualitas kegiatan penyelenggaraan seni tradisi dan budaya. Tahun 2015 hanya terdapat 18 penyelenggaraan kegiatan.

**w. Perpustakaan**

- 1) Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan daerah. Tahun 2015 hanya sebanyak 16.819 pengunjung;
- 2) Masih sedikitnya jumlah perpustakaan di tingkat kecamatan dimana hanya terdapat 2 Unit dari 14 Kecamatan di Kabupaten Rembang, dan jumlah perpustakaan keliling hanya 1 unit di tahun 2015 yang melayani seluruh wilayah kabupaten.
- 3) Masih terbatasnya jumlah pustakawan yang tersertifikasi.

**x. Kearsipan**

- 1) Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan (arsiparis) baik tenaga terampil maupun ahli. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah tenaga arsiparis kategori terampil yang hanya 2 (dua) orang dan belum adanya arsiparis kategori ahli ;

- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah; hal ini terlihat dari gedung penyimpanan arsip yang kurang representatif, Kendaraan perpustakaan keliling, bahan pustaka dan sarana penunjang lainnya. Untuk gedung dan ruangan yang tersedia baru dapat menampung 70% arsip yang ada; peralatan yang tersedia baru 60%.
- 3) Rendahnya duplikasi arsip ke dalam bentuk digital, tahun 2015 hanya mencapai 15%.
- 4) Rendahnya pengelolaan arsip secara baku. Capaian 2015 sebesar 31,9%

#### **y. Kelautan dan Perikanan**

- 1) Belum optimalnya pembinaan kelompok nelayan, baik itu kelompok nelayan tangkap, kelompok pembudidaya, maupun kelompok pengolah ikan, hal ini ditunjukkan bahwa cakupan pembinaan kelompok baru mencapai 32% pada tahun 2015.
- 2) Rendahnya produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2015 produksi perikanan budidaya baru mencapai 7.477 ton .
- 3) Masih rendahnya konsumsi ikan per kapita penduduk Kabupaten Rembang. Konsumsi ikan perkapita per tahun sebesar 24 kg/th, masih di bawah angka target nasional 35 kg/kapita / tahun.
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
- 5) Belum optimalnya rata-rata pendapatan nelayan. Capaian rata-rata pendapatan nelayan 2015 sebesar RP. 2.380.175,- per kapita perbulan
- 6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana TPI. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana pokok untuk tambat labuh kapal perikanan.

#### **z. Pariwisata**

- 1) Menurunnya jumlah kunjungan wisata pada destinasi wisata. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisata pada destinasi wisata Kabupaten Rembang sebanyak 727.453 orang, turun cukup banyak dibandingkan tahun 2013, yaitu sebesar

2.345.107 orang.

- 2) Masih rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan di Kabupaten Rembang. Pada tahun 2015 rata-rata lama tinggal wisatawan baru mencapai 1 hari.
- 3) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dalam satu kawasan wisata dan pengembangan desa wisata;
- 4) Kurangnya tenaga profesional di bidang pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata termasuk jasa perhotelan ;
- 5) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pariwisata terhadap total PAD sebesar 0,66%.
- 6) Belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif.

**aa. Pertanian**

- 1) Kualitas produk pertanian belum optimal dan pembangunan jaringan pemasaran masih terbatas;
- 2) Belum optimalnya produktivitas pangan utama padi, yaitu antara 4, 61 ton/ha – 6,10 ton/ha;
- 3) Minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan semakin menurun;
- 4) Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan;
- 5) Belum terbangunnya kawasan agro industri dan agro politan;
- 6) Terbatasnya jumlah dan kemampuan penyuluh dan kelompok tani mengenai teknik penyuluhan dan budidaya pertanian / pengembangan agribisnis pertanian;
- 7) Masih tingginya biaya produksi dalam usaha peternakan;
- 8) Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian.

**bb. Perdagangan**

- 1) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional sesuai standar;
- 2) Belum tersedianya pusat perdagangan bagi agrobisnis dan hasil peternakan;
- 3) Masih lemahnya perlindungan konsumen di Kabupaten Rembang ;

- 4) Belum optimalnya ekspor komoditas dari Kabupaten Rembang. Nilai ekspor yaitu pada tahun 2015 sebesar US\$ 18.983.364,60
- 5) Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap usaha UMKM dalam menghadapi MEA dan CAFTA.

**cc. Perindustrian**

- 1) Belum optimalnya pembinaan dan faslitasi pengembangan Industri kecil dan Menengah ; Pada tahun 2015 cakupan IKM yang dibina sebesar 1,1%.
- 2) Lemahnya akses modal bagi industri kecil.
- 3) Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi perijinan menurun, dari 40 IKM tahun 2013 menjadi 25 IKM pada tahun 2015.
- 4) Belum adanya kawasan industri yang dikelola secara modern.

**dd. Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 1) Belum optimalnya ketersediaan perencanaan pembangunan sektoral yang memadai;
- 2) Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3) Masih rendahnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan penganggarannya

**ee. Satpol PP**

- 1) Belum optimalnya upaya penjagaan ketertiban, ketenteraman dan pencegahan tindak kejahatan;
- 2) Belum optimalnya penanganan tindak pidana kriminal dan penanganan kasus penyakit masyarakat;
- 3) Belum optimalnya patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP;
- 4) Masih terbatasnya jumlah anggota Satpol PP;
- 5) Memudarnya pelaksanaan Siskamling pada masing-masing kelurahan/desa;
- 6) Masih terbatasnya jumlah pembinaan politik daerah.

**ff. Sekretariat Daerah**

- 1) Penataan peraturan perundangan belum sepenuhnya sesuai dengan tata peraturan perundangan yang baru, dengan jumlah

Perda yang ditetapkan dari tahun 2011 – 2015 sebanyak 40 Perda;

- 2) Belum semua unit-unit pelayanan PD memiliki pedoman standar pelayanan publik (SPP) dan melaksanakan evaluasi pelayanan publik (pengukuran IKM) secara berkala;
- 3) Belum semua unit aktifitas PD telah menyusun, menetapkan dan menerapkan SOP (standar operasional prosedur);
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pembangunan daerah.
- 5) Belum optimalnya evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah (Perda dan Perkada).
- 6) Belum adanya *roadmap* reformasi birokrasi.
- 7) Belum optimalnya pelaksanaan PATEN di masing masing kecamatan.

**gg. Sekretariat DPRD**

- 1) Belum optimalnya kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.

**hh. Kepegawaian**

- 1) Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Belum optimalnya manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara).

**ii. Keuangan Daerah**

- 1) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan sistem informasi manajemen (SIM) yang bersifat terpadu;
- 2) Belum optimalnya intensifikasi pajak daerah dan ekstensifikasi serta intensifikasi retribusi daerah.
- 3) Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset dan barang milik daerah.
- 4) Belum tercapainya opini BPK dengan kategori WTP atas pelaporan keuangan daerah.

**jj. Inspektorat Daerah**

- 1) Meningkatnya regulasi yang baru dalam pelaksanaan pengawasan sehingga memerlukan pemahaman dari pemeriksa dan obyek pemeriksaan (PD);



- 2) Masih kurangnya kapasitas SDM pemeriksa sehingga tingkat kelulusan dalam diklat penjenjangan belum optimal;
- 3) Masih kurangnya kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah).
- 4) Belum optimalnya SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada masing masing PD.

#### **4.2. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah**

Untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan, serta arahan dan amanat regulasi dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) terkait sinergitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka perlu untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 yang masing masing dijelaskan berikut ini.

##### **a. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019**

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah:

**”TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.**

Visi pembangunan nasional tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 menggariskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
  - 1) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
  - 2) Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.

- 3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

b. Tiga Dimensi Pembangunan

- 1) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

- 2) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

- a) Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
- b) Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- c) Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- d) Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

- a) Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
- b) Wilayah pinggiran;
- c) Luar Jawa;
- d) Kawasan Timur.

c. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas.

Kondisi tersebut antara lain:

- 1) Kepastian dan penegakan hukum;
- 2) Keamanan dan ketertiban;
- 3) Politik dan demokrasi; dan
- 4) Tatakelola dan reformasi birokrasi.

d. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal,

meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

- b. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

- c. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

- d. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah

dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

e. **Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.**

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

f. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.**

Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

g. **Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.**

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

## **b. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018**

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 adalah:

### **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI**

*“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”*

Terdapat 7 (tujuh) Misi yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi tersebut, yaitu:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

Misi pertama merupakan kerangka acuan bagi enam misi lainnya dengan mentransformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah memiliki karakter berbasis pada nilai ideologis Trisakti Bung Karno yaitu Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan. Landasan Trisakti ini perlu juga diaktualisasikan sebagai respon atas perubahan situasi global yang memiliki dampak pada posisi kedaulatan negara, khususnya kedaulatan atas pangan dan energi sebagai prasyarat keberdikarian sebuah bangsa.

Kedaulatan pangan dan energi sebagai *pengejawantahan* bangunan Trisakti akan memberikan implikasi bukan saja berdikari di bidang ekonomi, namun juga akan melahirkan karakter politik yang lebih berdaulat, dan melebur pada bangunan karakter rakyat Jawa Tengah dengan melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Jawa.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, pengendalian alih fungsi lahan yang didukung dengan



reformasi agraria, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi.

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial masyarakat melalui melibatkan kelembagaan sosial dalam proses perencanaan partisipatif, revitalisasi kearifan lokal yang diadopsi dalam proses komunikasi politik, serta peningkatan peran dan fungsi seni budaya dan olah raga.

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, serta sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, sertaantisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.

Mendasarkan strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, maka dirumuskan 11 (sebelas) Program Unggulan sebagai jabaran operasional, sehingga dapat diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya, yaitu :

1. Pendidikan Politik Masyarakat;
2. Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi;
3. Memperkuat Sistem Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan Desa Mandiri;
5. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
6. Rakyat Sehat;
7. Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah;
8. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak;
9. Pembangunan Infrastruktur;
10. Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo-Royo;
11. Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa.

Secara khusus, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rembang juga termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dimana dijelaskan terkait dengan Arah Pengembangan Wilayah Banglor yang meliputi 2 (dua) kabupaten di perbatasan sebelah timur-utara Jawa Tengah dengan Jawa Timur yaitu Kabupaten Rembang dan Blora.

Potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Banglor adalah: (1) primer berupa minyak dan gas, garam, perikanan; (2) sekunder berupa furniture, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa pariwisata. Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu:

- a. Kabupaten Rembang: industri unggulan batik, garam; klaster genteng dan batu bata, garam rakyat, gula tumbu, batik tulis Lasem, bordir dan konveksi di Kecamatan Sedan, mangga, pengolahan hasil perikanan; serta destinasi wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini dan Wana Wisata Mantingan;
- b. Kabupaten Blora: industri unggulan mebel, keramik, batik; klaster pertanian, mineral dan bahan tambang, pariwisata, handycraft dan mebel, pangan olahan, batik; serta destinasi wisata Waduk Tempuran dan Wana Wisata Hutan Jati Blora

Arah pengembangan wilayah difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama, ditunjang oleh koridor perkotaan Rembang-Lasem. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, perikanan, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Arah pengembangan sektor unggulan dilakukan dalam wadah kerjasama perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur yang disebut sebagai regionalisasi Ratubangnegoro (Blora-Tuban-Rembang-Bojonegoro).

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai wilayah Banglor meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan TPT tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1.**

**Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Banglor  
Per Kabupaten/Kota Tahun 2017-2018**

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
		2017	2018
1	Rembang	5,20 – 5,60	5,60 – 6,00
2	Blora	4,50 – 5,00	5,00 – 5,40

Sumber: RPJMD Jawa Tengah 2013-2018

**Tabel 4.2.**

**Sasaran Angka Kemiskinan Wilayah Banglor  
Per Kabupaten/Kota Tahun 2017-2018**

No	Kabupaten/Kota	Angka Kemiskinan (%)	
		2017	2018
1	Rembang	15,9	14,7
2	Blora	11,3	10,4

Sumber: RPJMD Jawa Tengah 2013-2018

**Tabel 4.3.**  
**Sasaran TPT Wilayah Banglor Per Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2017-2018**

No	Kabupaten/Kota	TPT (%)	
		2017	2018
1	Rembang	5,5	5,4
2	Blora	4,0	3,7

Sumber: RPJMD Jawa Tengah 2013-2018

Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Banglor yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan konsep pengembangan wilayah Banglor adalah Pengembangan Agrowanaminapolitan, Industri, dan Pertambangan Wilayah Banglor secara Berkelanjutan.

Guna mendukung konsep tersebut maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Banglor sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4.**  
**Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Banglor**

Konsep Pengembangan	Aspek	Kebijakan	Strategi
Pengembangan Agrowanaminapolitan, Industri, dan Pertambangan Wilayah Banglor secara Berkelanjutan	Ekonomi	Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Banglor melalui pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai	Mengoptimalkan dukungan infrastruktur dalam pengembangan aktivitas ekonomi wilayah
	Fisik (Infrastruktur, Konektivitas, Alam)	Pengembangan potensi kawasan pesisir di wilayah Banglor	Melakukan penataan kawasan pesisir
		Pengembangan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di wilayah Banglor	Melestarikan kawasan lindung pada kawasan rawan longsor
			Mengoptimalkan jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana
			Memperketat pengendalian pemanfaatan ruang
	Pengembangan pelayanan infrastruktur jalan di yang merata dan terkoneksi di wilayah Banglor	Meningkatkan kualitas jaringan jalan untuk mendukung aktivitas dan konektivitas	

Konsep Pengembangan	Aspek	Kebijakan	Strategi	
	Sosial	Pengembangan kualitas sumber daya manusia di wilayah Banglor melalui pendidikan formal dan informal	wilayah	
			Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	
		Meningkatkan pelayanan pendidikan non formal bagi kelompok UMKM		
		Meningkatka kualitas pelayanan kesehatan		
		Pengoptimalan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata di wilayah Banglor		
		Penangan permasalahan sosial di kawasan perbatasan wilayah Banglor		Mengentaskan kemiskinan pada kawasan perbatasan
	Tata Kelola	Pengembangan kinerja kelembagaan dalam pengembangan wilayah Banglor dalam pelayanan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial		Meningkatkan kerjasama regional Banglor dalam penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan regional
				mengembangkan sektor ekonomi yang sinergis antar wilayah
				Mewujudkan tata kelola pengembangan wilayah Bregamalang yang aktif
	Lingkungan Hidup	Pengintegrasian keberlanjutan lingkungan dengan pengembangan ekonomi di wilayah Banglor		Pelestarian sumber daya air, tanah, dan hutan
			Mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan resiko bencana di wilayah Banglor	

Sumber: RPJMD Jawa Tengah 2013-2018

### 4.3. Isu Strategis Daerah

Berdasarkan uraian gambaran kondisi daerah yang telah dikemukakan pada Bab II dan hasil identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, dirumuskan isu-isu strategis yang

dihadapi Kabupaten Rembang pada lima tahun yang akan datang. Penyusunan isu strategis menggunakan pembobotan sebagaimana diamantkan dalam Permendagri 54 tahun 2010. Hasil pembobotan sebagai berikut:

**Tabel 4.5.**

**Ranking Hasil Pembobotan Isu Strategis**

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Tingginya Angka Kemiskinan	20	8	20	10	13	24	95
2	Pembangunan Desa	18	8	20	10	14	20	90
3	Masih Kurangnya Derajad Kesehatan Masyarakat	20	9	19	7	12	22	89
4	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	20	8	20	8	7	25	88
5	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	20	9	17	7	12	22	87
6	Kualitas Infrastruktur	19	8	20	10	13	16	86
7	Kondusivitas Daerah	17	10	17	7	12	21	84
8	Pengangguran	20	8	20	7	7	21	83
9	Melambatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian	15	9	16	7	11	22	80
10	Rendahnya Ketahanan Pangan	20	7	16	8	11	17	79
11	Menurunnya Kunjungan Wisatawan	14	9	12	8	13	22	78
12	Perwujudan <i>Good Governance</i>	20	8	13	6	8	22	77
13	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi	17	5	16	8	9	17	72
14	Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Penanaman Modal	13	9	13	8	10	16	69

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian dari ekspert berdasarkan kriteria yang ditetapkan isu tentang kemiskinan menempati ranking tertinggi. Penilaian ini didasarkan pada *expert judgement*, yaitu penilaian dari ahli dengan menggunakan kriteria tersebut.

Sehingga rumusan isu strategis daerah selama lima tahun ke depan (2016-2021) adalah sebagai berikut:

#### **a. Penurunan Angka Kemiskinan**

Berdasarkan basis data terpadu 2015, 50% penduduk Kabupaten Rembang merupakan penduduk dengan status kesejahteraan 40% terendah, sebesar 310.721 jiwa atau 91.179 rumah tangga. Distribusi terbesar pada desil 1, yaitu sebesar 39,18% individu atau 33,59% rumah tangga. Permasalahan kemiskinan dapat dilihat dari 4 (empat) komponen bidang yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pada bidang ekonomi, penduduk usia produktif (15-60 tahun) terdapat 34.689 jiwa tidak bekerja. Tiga kecamatan dengan jumlah penduduk tidak bekerja terbanyak ada 4.422 jiwa di Kecamatan Sedan, 3.266 jiwa di Kecamatan Sarang dan 3.090 jiwa di Kecamatan Kragan. Bidang pendidikan terdapat penduduk tidak bersekolah pada usia sekolah 7-18 tahun sebanyak 11.512 jiwa, dengan komposisi terbesar pada kelompok usia 16-18 tahun sebesar 8.204 jiwa (71,26%). Dilihat dari kondisi kesehatan, penduduk yang berpenyakit kronis sebanyak 10.435 jiwa dengan distribusi terbesar pada kelompok usia di atas 60 tahun sebesar 5.046 jiwa (48,36%), jumlah tertinggi sebesar 1.716 jiwa ada di Kecamatan Kragan dan 1.004 jiwa ada di Kecamatan Kaliori. Sedangkan penyandang cacat sebanyak 5.045 jiwa dengan distribusi terbesar pada kelompok usia 15 sampai dengan dibawah 45 tahun sebesar 38,06%. Dua wilayah tertinggi di Kabupaten Rembang berada di Kecamatan Kragan dan Sedan mempunyai jumlah penyandang cacat sebesar 563 jiwa dan 501 jiwa. Rumah tidak memiliki fasilitas tempat BAB (jamban) sebanyak 21.638 unit, dengan jumlah terbanyak 4.293 berada di Kecamatan Sarang. Selain itu, pada sektor infrastruktur dasar di Kabupaten Rembang terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 59.453 unit. Rumah tidak berlistrik sebanyak 42 unit, 7 unit diantaranya ada di Kecamatan Sulang dan rumah berlistrik tanpa meteran sebanyak 15.099 unit, jumlah terbanyak 1.898 unit berada di Kecamatan Sedan.



### **b. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi perlu mendapatkan akselerasi di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cenderung melambat. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sebesar 5,32% dan pada tahun 2014 sebesar 5,15%. Perlu upaya serius dalam rangka menggairahkan dinamika perekonomian Kabupaten Rembang. Pertumbuhan ekonomi yang melambat akan berdampak pula semakin menurunnya kesempatan kerja dengan demikian menjadi salah satu sebab meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka.

### **c. Perwujudan *Good Governance***

Perwujudan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih belum berjalan dengan optimal di Kabupaten Rembang. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan *E-government* dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sudah banyak dilakukan namun belum optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Beberapa pelayanan publik berbasis IT belum semuanya dapat diakses masyarakat. Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan *E-government* ini cukup besar, mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi IT terbatas. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pada sisi perencanaan pembangunan daerah, implementasi proses perencanaan tahunan dan 5 tahunan belum berjalan optimal, termasuk ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan.

### **d. Perluasan Kesempatan Kerja**

Angka pengangguran di Kabupaten Rembang dari tahun 2011- 2015 fluktuatif. Persentase TPT tahun 2015 sebesar 4,51%. Kondisi ini

perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak terutama yang berkaitan dengan pengendalian dari sisi *supply* dan *demand*. Pengendalian angkatan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi permasalahan tersendiri, sementara itu perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja harus dapat ditingkatkan dengan mendorong sektor usaha padat karya dan UMKM.

#### **e. Kualitas Infrastruktur**

Penyediaan dan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan memadai dalam rangka menyediakan prasarana dasar bagi aktivitas penduduk belum terlaksana secara optimal. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik masih relatif rendah yaitu 48,98%, rusak dan rusak berat sebesar 24,75% sedang yang lain rusak sedang sebesar 26,27% pada tahun 2015. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan dalam kondisi bagus sangat penting untuk menunjang aktivitas perekonomian dan pengembangan usaha di Kabupaten Rembang. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni yaitu pada tahun 2015 sebanyak 59.453 unit. Kurangnya infrastruktur pariwisata pada destinasi pariwisata unggulan. Belum terintegrasinya pembangunan jaringan irigasi dan air minum berbasis embung sungai, sumur bawah tanah yang disambungkan dengan instalasi pengolahan air.

#### **f. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.**

Kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang masih relatif rendah dibandingkan kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. IPM Kabupaten Rembang tahun 2014 sebesar 67,40, lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Tengah yaitu 68,78, dan menduduki peringkat ke 20 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

#### **g. Pembangunan Desa**

Dengan berlakunya UU No 6 tahun 2014 tentang desa, implikasi terhadap dinamika pembangunan desa sangat tinggi, kucuran dana dari pemerintah pusat yang cukup besar dan juga dari pemerintah provinsi dan Kabupaten menyebabkan akselerasi pembangunan desa cukup tinggi. Kesiapan pemerintah desa dan pemerintah

kabupaten untuk pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dirasakan masih belum optimal.

#### **h. Kondusivitas Daerah**

Kondisi daerah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masih belum optimal, artinya kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Rembang belum secara optimal mampu menjamin masyarakat tenang dalam melaksanakan aktivitas sosial maupun ekonomi. Jumlah tindak kriminal di Kabupaten Rembang masih cukup tinggi. Jumlah kasus bervariasi selama tahun 2011 – 2015 yaitu bergerak antara 351 kasus – 421 kasus.

#### **i. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan**

Masih lemahnya ekosistem pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan lain di bidang pendidikan antara lain rendahnya tingkat pemerataan pelayanan pendidikan, ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan, keteterjangkauan pelayanan pendidikan, belum optimalnya kualitas pendidikan dan belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan non formal serta PAUD. Kondisi ini ditunjukkan oleh masih kurangnya lembaga TK dan PAUD, yaitu untuk TK masih dibutuhkan kurang lebih 395 unit PAUD. APM SMP/MTs/Paket B cenderung menurun, walau tidak terlalu drastis, yaitu pada tahun 2015 sebesar 76,50% turun dibandingkan dengan APM SMP/MTs/Paket B tahun 2014 (77,26%).

#### **j. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Rembang masih relatif rendah. Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Rembang tahun 2014 sebesar 74,19 tahun, berada diatas Jawa Tengah sebesar 73,88 tahun, dan Nasional 70,73 tahun.

Meningkatnya penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan tingkat penularan penyakit seperti TB dan HIV AIDS. Angka Kesakitan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun 2014 menurun tajam menjadi IR 34,2/100.000 penduduk

(211 kasus) dari sebelumnya 54,8/100.000 penduduk (358 kasus). Sedangkan rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menyebabkan tingginya kasus DBD. Angka kejadian TB/100.000 penduduk sebesar 90 pada tahun 2015. Sedangkan angka kesakitan DBD 113,15/100.000 penduduk pada tahun 2015, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 sebesar 16,23

Tingginya kasus kematian bayi dan balita. Kasus kematian bayi disebabkan oleh kasus asfeksia, BBLR dan infeksi penyakit lainnya. Balita stunting belum menjadi prioritas dalam penanganan gizi masyarakat. Tahun 2015, AKB 134 kasus (14,86/1.000 KH) dan AKABA 163 kasus (18,08/1000 KH). Kondisi ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2014, jumlah kelahiran hidup sebanyak 8.999 bayi, jumlah bayi yang meninggal sebanyak 125 bayi dengan Angka Kematian bayi (AKB) sebesar 13,89/1.000 KH.

#### **k. Revitalisasi Sektor Pertanian**

Pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB selama kurun waktu 2011 – 2014 menunjukkan kecenderungan melambat, namun pertanian masih memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PDRB dan penyerapan tenaga kerja (Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2011 sebesar 33,67% dan pada tahun 2014 sebesar 30,23%). Melambatnya kontribusi sektor pertanian karena permasalahan kurangnya air baku untuk pertanian, yang diukur dari besarnya Indeks Pertanaman (IP) yang selama 2015 sebesar 1,8. Revitalisasi sektor pertanian akan mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang.

#### **1. Daya Saing Pariwisata**

Lemahnya daya saing pariwisata diindikasikan dengan penurunan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan pada berbagai DTW di Kabupaten Rembang. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisata pada destinasi wisata Kabupaten Rembang sebanyak 727.453 orang, turun cukup banyak dibandingkan tahun 2013, yaitu sebesar 2.345.107 orang. Rendahnya kunjungan wisatawan disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas, amenitas, atraksi dan aktivitas serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana destinasi pariwisata.

**m. Peningkatan Ketahanan Pangan**

Rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk dan belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang. Hal ini ditandai dengan dengan skor PPH sebesar 85,9 angka ini belum ideal karena terdapat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap konsumsi beras dan terigu. Masih terdapat daerah rawan pangan dan masih rentannya ketahanan pangan pada skala rumah tangga. Pengelolaan sistem cadangan pangan daerah akan memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Rembang.

**n. Peningkatan Daya Tarik Penanaman Modal**

Belum optimalnya tindak lanjut kerjasama di bidang penanaman modal; promosi investasi dan daya tarik serta daya dukung investasi, persentase kerjasama di bidang investasi yang ditindaklanjuti sebesar 37,03% pada tahun 2015. Jumlah investor cenderung tetap pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 20 investor dengan total investasi sebesar 3,478 T.

**o. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.**

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Sumberdaya alam di Kabupaten Rembang memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Rembang. Namun demikian pemanfaatan sumberdaya alam ini harus memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan agar lingkungan tetap lestari dan keberlangsungan pembangunan tetap terjaga. Penanganan isu strategis ini dapat dilaksanakan melalui upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan pada setiap kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup serta penanganan bencana.

#### 4.4. Penelaahan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Rembang seperti termuat dalam RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 perlu untuk ditelaah mengingat arahan dan amanat regulasi. Adapun tahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025, yang terdiri dari:

1. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah I (Tahun 2005-2009)
2. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah II (Tahun 2010-2014)
3. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah III (Tahun 2015-2019)
4. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah IV (Tahun 2020-2024)

Dimana berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 masuk kedalam 2 tahapan yaitu Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah III (Tahun 2015-2019) dan Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah IV (Tahun 2020-2024).

Permasalahan penting atau isu strategis pembangunan yang perlu menjadi perhatian sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 adalah terkait dengan:

1. Kemiskinan, pengangguran dan rendahnya kualitas SDM. Sejalan dengan trend pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dalam lima tahun terakhir, maka pembangunan yang akan datang masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan kualitas SDM masyarakat yang kurang siap bersaing di era global yang makin kompetitif mengingat secara umum kondisi masyarakat Kabupaten Rembang berada di bawah garis kemiskinan.
2. Belum optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sumberdaya alam yang dimiliki oleh kabupaten Rembang tergolong melimpah, untuk itu pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam agar dioptimalkan guna menunjang pembangunan di segala bidang. Dengan garis pantai yang tergolong terpanjang di Propinsi Jawa

Tengah, Kabupaten Rembang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan tingkat produksi yang meningkat dari tahun-ke tahun.

3. Kualitas dan kuantitas infrastruktur belum memadai. Di sisi lain terkait pembangunan infrastruktur wilayah masih dihadapkan beberapa kelemahan seperti masih kurang optimalnya pengaturan dalam pembangunan infrastruktur, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman masih kurang, kondisi infrastruktur permukiman seperti air minum, drainase, persampahan maupun air limbah belum memadai, infrastruktur pelabuhan masih kurang maupun pengelolaan potensi air permukaan belum optimal untuk menampung kelebihan air pada musim hujan melalui pembangunan embung, bendung dan check dam.
4. Rendahnya Minat Investasi. Kabupaten Rembang mempunyai potensi penanaman modal yang cukup terbuka yang sebagian besar didorong oleh adanya daya tarik potensi sumberdaya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dari tersedianya jumlah tenaga kerja yang memadai dan murah yang juga menjadi daya tarik pasar konsumsi. Pernyataan ini dapat diperkuat dengan kondisi eksisting Kabupaten Rembang yang memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar berbasis sumberdaya alam seperti potensi pertambangan galian C, potensi kelautan dan perikanan serta potensi pertanian dan kehutanan disamping pula potensi daya tarik wisata berbasis sumberdaya alam.
5. Globalisasi dan Perdagangan Bebas. Beberapa permasalahan yang menjadi fokus perhatian bagi Kabupaten Rembang dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas adalah kurang siapnya sektor usaha dalam menghadapi iklim persaingan yang sangat ketat. Yang menjadi akar permasalahan sektor usaha di Kabupaten Rembang adalah lemahnya kualitas SDM terutama pengusaha maupun tenaga kerja yang mayoritas kurang menguasai teknologi dan inovasi serta akses permodalan yang terbatas. Kendala- kendala ini menyebabkan efisiensi dan kualitas produksi sektor usaha kurang



mampu bersaing dengan negara lain yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik dan murah.

6. Krisis energi. Sebagai daerah yang sedang berkembang, pertumbuhan penduduk dan industri di Kabupaten Rembang menuntut adanya ketersediaan energi dalam jumlah yang cukup. Sementara itu, energi minyak bumi dan gas alam yang tersedia jumlahnya semakin terbatas dan jenis energi tersebut sifatnya tidak dapat diperbaharui. Fakta empiris selama ini telah banyak membuktikan bahwa keterbatasan ketersediaan energi, bukan saja menyebabkan harga energi di pasaran menjadi makin mahal, tetapi juga menyebabkan efek domino terhadap peningkatan harga kebutuhan masyarakat yang lain. Salah satu dampak yang selalu terjadi akibat adanya krisis energi adalah harga satuan energi semakin tidak terkendali terutama BBM dan listrik yang akan menyebabkan kekurangan energi di berbagai daerah karena ketidakmampuannya untuk membeli atau memproduksi energi. Ancaman krisis energi juga menyebabkan terbukanya potensi konflik sosial sebagai akibat meningkatnya jumlah orang miskin dan bertambahnya pengangguran
7. Kerusakan lingkungan. Pembangunan lingkungan hidup harus memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan sehingga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dapat dipertahankan. Pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Rembang dalam mendukung pembangunan sektor lainnya dapat diupayakan melalui pengembangan potensi hutan mangrove, hutan rakyat, pengelolaan sawah lestari, kawasan ruang terbuka publik, kawasan lindung di luar hutan lindung, Daerah Aliran Sungai (DAS), sumber mata air dan dengan adanya dukungan kondisi geografis mulai dari dataran tinggi, sedang dan rendah sehingga memudahkan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dari hulu ke hilir.

Berdasarkan data kondisi umum daerah Kabupaten Rembang, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan, dan potensi serta peluang yang ada, dirumuskan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Rembang tahun 2005-2025 adalah “REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”. Untuk



mewujudkan visi tersebut diatas, ditempuh melalui 5 (lima) cara atau misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.  
 Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya visi Rembang maju, mandiri dan sejahtera. Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai oleh adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, makin mantapnya kearifan lokal; dan meningkatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang. Disamping itu juga ditunjukkan pula oleh makin kuatnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan oleh watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis.
2. Mewujudkan pengembangan perekonomian dan daya saing daerah.  
 Pemanfaatan dan pengembangan potensi perekonomian daerah secara optimal diharapkan akan dapat menopang pencapaian visi Rembang maju, mandiri dan sejahtera. Pemanfaatan potensi Kabupaten Rembang ini meliputi potensi pertanian dalam arti luas, potensi pertambangan, potensi kelautan perikanan dan potensi industri serta jasa. Pengembangan potensi ekonomi yang ada juga ditujukan ke arah peningkatan daya saing daerah dalam produktivitas barang dan jasa. Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai oleh peningkatan dan pertumbuhan PDRB yang memadai, peningkatan pendapatan masyarakat dan semakin tingginya kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.  
 Pemerintahan yang bersih dan baik atau good governance merupakan suatu hal mutlak yang harus dilakukan, untuk mewujudkan tercapainya visi Kabupaten Rembang. Tata Pemerintahan yang baik memiliki ciri-ciri antara lain: (1) akuntabilitas (*accountabilty*), ialah kewajiban untuk

mempertanggung-jawabkan; (2) keterbukaan dan transparan (*openness and transparency*); (3) ketaatan pada hukum; (4) komitmen kuat untuk bekerja bagi kepentingan umum, dan bukan pada kelompok atau pribadi; (5) komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahap-tahap pembangunan.

4. Mewujudkan pengembangan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang memadai akan menjamin terjadinya percepatan tercapainya kemajuan dan kesejahteraan. Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai dengan ketersediaan infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan mempercepat mobilitas barang dan jasa. Infrastruktur dimaksud meliputi perhubungan, jalan dan jembatan, pengairan, air bersih, sanitasi, permukiman dan perumahan, persampahan, serta infrastruktur dan komunikasi.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Sumberdaya alam di Kabupaten Rembang memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Rembang. Namun demikian pemanfaatan sumberdaya alam ini harus memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan agar lingkungan tetap lestari dan keberlangsungan pembangunan tetap terjaga. Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai adanya eliminasi dampak lingkungan berupa adanya upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan pada setiap kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut, telah dijelaskan tahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025, yang terdiri dari:

1. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah I (Tahun 2005-2009)
2. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah II (Tahun 2010-2014)
3. **Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah III (Tahun 2015-2019)**

#### **4. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah IV (Tahun 2020-2024)**

Berdasarkan tahapan pembangunan diatas, maka penekanan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 ini masuk dan mengacu pada Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah III (Tahun 2015-2019) dan IV (Tahun 2020-2024) dengan sasaran pembangunan pada:

1. Terwujudnya SDM yang Berkualitas
2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing.
3. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai.
4. Terwujudnya Kehidupan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
5. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.